

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA-005.03.2.099239/2021**

A. Dasar Hukum :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
  2. Unit Organisasi : (03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
  3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
  4. Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
- Sebesar :Rp. 480.680.000,00 ( EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

	Jumlah Uang
005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 480.680.000,00
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 480.680.000,00

C. Sumber Dana Berasal Dari:

- |                               |                    |                                |          |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. 480.680.000,00 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. 0,00 |
| 2. PNBP                       |                    | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. 0,00 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. 0,00           | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. 0,00 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. 0,00           | 5. Hibah Langsung              | Rp. 0,00 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. 0,00           | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. 0,00 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. 0,00           | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. 0,00 |
|                               |                    | 6. SBSN PBS                    | Rp. 0,00 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Pontianak (042) Rp. 480.680.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). MAHKAMAH AGUNG, Ditjen Badan Peradilan Umum
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

DS: 0692-1470-3657-8600

JAKARTA, 23 November 2020  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

**ASKOLANI**  
196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA-005.03.2.099239/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode / Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman IA.1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				480.680.000,00
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				480.680.000,00
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum				
	:	2. 02	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan				
	:	3. 03	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan				
	:	4. 04	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara				
	:	5. 05	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
	:	6. 06	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung				
Klasifikasi Rincian Output	1 :	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		850.00	Perkara	412.680.000,00
Rincian Ouput	:	01	BCA.083 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat		750.00	Perkara	315.000.000,00
		02	BCA.084 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat		60.00	Perkara	53.400.000,00
		03	BCA.085 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat		40.00	Perkara	44.280.000,00
Klasifikasi Rincian Output	2 :	1049.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		20.00	Orang	20.000.000,00
Rincian Ouput	:	01	FAC.001 Kompetensi SDM		20.00	Orang	20.000.000,00
Klasifikasi Rincian Output	3 :	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		380.00	Orang	48.000.000,00
Rincian Ouput	:	01	QBA.032 Pos Bantuan Hukum (PN)		380.00	Orang	48.000.000,00

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA-005.03.2.099239/2021  
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga: (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode>Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman IB.1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	480.680.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	480.680.000,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	0,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA-005.03.2.099239/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode / Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>099239</b>	<b>PENGADILAN NEGERI PONTIANAK</b>	-	<b>480.680,00</b>	-	-	-	<b>480.680,00</b>		
<b>005.03.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	-	<b>480.680,00</b>	-	-	-	<b>480.680,00</b>		
<b>1049</b>	<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	-	<b>480.680,00</b>	-	-	-	<b>480.680,00</b>		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	412.680,00	-	-	-	412.680,00	13.51	
01	RM	-	412.680,00	-	-	-	412.680,00	042	RM
1049.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	13.51	
01	RM	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	042	RM
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	48.000,00	-	-	-	48.000,00	13.51	
01	RM	-	48.000,00	-	-	-	48.000,00	042	RM
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>480.680,00</b>	-	-	-	<b>480.680,00</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA-005.03.2.099239/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT  
Kode dan Nama Satker : (099239) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : III.1  
(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.240	480.680
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.240	480.680
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.240	480.680
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.240	480.680
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342	8.347	100.109
		- PNBPN (425232)	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	11.820
		- PNBPN (425233)	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.757	33.040
		- PNBPN (425239)	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.605	55.249

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

**Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
NIP 196303251988031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA-005.03.2.099239/2021  
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode / Nama Satker : [099239] PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020

Direktur Jenderal Badilum

ttd.

**Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
NIP 196303251988031001

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA-005.03.2.099239/2021  
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT  
Kode / Nama Satker : [099239] PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Badilum

**Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
NIP 196303251988031001